

**SKRIPSI**

**PARTISIPASI PUBLIK DALAM PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN  
PEDESAAN MANDIRI (PKPM) DESA WISATA *BARUGA COLLABORATION CENTRE*  
KECAMATAN MALILI, KABUPATEN LUWU TIMUR**

**RIFKI HENDRYANSAH**

**E011201047**



**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI PUBLIK**

**DEPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR**

**2024**

**THESIS**

**PUBLIC PARTICIPATION IN THE INDEPENDENT RURAL AREA DEVELOPMENT  
PROGRAM (PKPM) OF BARUGA VILLAGE TOURISM COLLABORATION CENTER,  
MALILI SUBDISTRICT, EAST LUWU REGENCY**

**RIFKI HENDRYANSAH**

**E011201047**



**STUDY PROGRAM OF PUBLIC ADMINISTRATION  
DEPARTMENT OF ADMINISTRATION SCIENCE  
FACULTY OF SOCIAL AND POLITICAL SCIENCES  
HASANUDDIN UNIVERSITY  
MAKASSAR  
2024**



**UNIVERSITAS HASANUDDIN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
DEPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI  
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK**

**LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI**

Nama : Rifki Hendryansah  
Nim : E011201047  
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik  
Judul : Partisipasi Publik dalam program pengembangan kawasan pedesaan mandiri (PKPM) desa wisata Baruga Collaboration Centre, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur

Telah diperiksa oleh Pembimbing dan dinyatakan layak untuk Ujian Proposal Penelitian Skripsi. Program Sarjana Departemen Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin.

Makassar, 5 Agustus 2024

Menyetujui  
Pembimbing Tugas Akhir

Mengetahui  
Ketua Departemen Ilmu Administrasi,

Dr. Muh. Tang Abdullah, S.Sos., M.A.P.  
NIP. 197205072002121001



Prof. Dr. Anni, M.Si  
NIP. 196310151989031006

**PARTISIPASI PUBLIK DALAM PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN  
PEDESAAN MANDIRI (PKPM) DESA WISATA BARUGA COLLABORATION  
CENTRE KECAMATAN MALILI, KABUPATEN LUWU TIMUR**

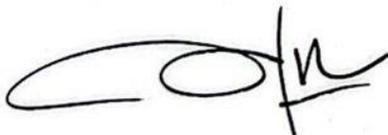
**RIFKI HENDRYANSAH  
E011201047**

Skripsi

Telah dipertahankan didepan Panitia Ujian Sarjana Administrasi Publik pada tanggal 19  
Agustus 2024  
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan  
pada

Program Studi Administrasi Publik  
Departemen Ilmu Administrasi  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Makassar

Mengesahkan  
Pembimbing Tugas Akhir



Dr. Muh. Tang Abdullah, S.Sos., M.A.P  
NIP 197205072002121001

Mengetahui  
Ketua Departemen Ilmu Administrasi,



Prof. Dr. Alwi M. Si  
NIP.196310151989031006

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI DAN PELIMPAHAN HAK CIPTA

Dengan ini saya menyatakan bahwa, skripsi berjudul "Partisipasi Publik Dalam Program Pengembangan Kawasan Pedesaan Mandiri (PKPM) Desa Wisata Baruga Collaboration Centre kecamatan Malili, kabupaten Luwu Timur" adalah benar karya saya dengan arahan dari pembimbing (Dr. Muh. Tang Abdullah, S.Sos., M.A.P.). Karya ilmiah ini belum diajukan dan tidak sedang diajukan dalam bentuk apapun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka skripsi ini. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini adalah karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut berdasarkan aturan yang berlaku. Dengan ini saya melimpahkan hak cipta (hak ekonomis) dari karya tulis saya berupa skripsi ini kepada Universitas Hasanuddin.

Makassar, 19 Agustus 2024



Rifki Hendryansah  
E011201047

## UCAPAN TERIMA KASIH

Penelitian dapat terlaksana dengan sukses dan Skripsi ini dapat terampungkan atas bimbingan, diskusi dan arahan Dr. Muh. Tang Abdullah, S.Sos.,M.A.P sebagai Pembimbing, Dr. Nurdin Nara, M.Si sebagai Penguji 1, dan Dr. Ishak Salim, S.IP., M.Si. sebagai Penguji 2. Penulis berterima kasih kepada mereka secara penuh. Penghargaan yang tinggi juga yang penulis sampaikan kepada Bapak Iskandar, dan Pak Toni yang telah mengizinkan untuk melaksanakan penelitian di lapangan, dan kepada seluruh stackholder dan informan yang membantu dalam merampungkan penelitian ini.

Penulis dedikasikan tulisan ini kepada orang yang tulus merawatnya sedari bayi hingga dewasa, orang yang medidik agar menjadi insan yang kuat sampai sekarang, orang yang selalu mendoakan penulis dan tak terputus sampai sekarang, orang yang tak ada letihnya menyerahkan waktu, tenaga, dan pikirannya agar anaknya bisa sarjana. Tidak lain dan tidak bukan adalah Ibu Ramliaty dan bapak Nasaruddin. Penghargaan yang besar penulis berikan juga kepada saudara saudara saya Sigit, Lulu, Adli yang senantiasa memberikan support dan memberikan dukungan moril maupun materil. Terima kasih dari lubuk hati yang terdalam yang diberikan oleh peneliti.

Terima kasih kepada HUMANIS FISIP UNHAS, yang menjadi tempat penulis bisa berkembang, belajar, dan berproses selama di Unhas. Terima Kasih kepada PENA20 yang menjadi “Rumah” pertama saat menjajakan kaki di Unhas dan tempat awal saya dalam berproses. Kepada Sahabat sejawat selama di Makassar dan di bangku kuliah yaitu Ocan, Nuni, Uci, dan Pammi. Mereka lah sebagai saudara selama merantau di Makassar, tanpa mereka saya bukan siapa siapa, tanpa mereka saya tidak akan pernah improve, dan tanpa mereka lah Rifki Hendryansah hanyalah mas mas kesepian yang ada di Makassar. Kepada sobat Kiminfi (Pitti, Salom, TriNanda, Yulis) atas segala kerandomannya dan yang selalu teman kerja yang setia dan mengasyikkan ketika berhimpunan. Terima Kasih Kepada Anak Ibunda lis atau Posko 1 Palanro KKN 110 (Iqqi, Fika, Fio, Fian, Ipeh, Ros, Icel, Tya, Marwan, Ical) atas kenangan indah saat mengabdikan dan menjadi “pelajaran” dalam bersaudara yang tak sedarah. Kepada Stuvo Buddies atau Stuvo Batch 4 Unhas (Alif, Hikmah, Yudhi, Lilis, Yuya, Abil, Alya, Fatria, Geby, Dody) atas solidaritas dan kerandomannya untuk bekerja sama dalam mengabdikan di Unhas. Kepada Prof Hasniati, Bu Ija, Mace Mia, Pak Jaya, Pak Lili, Bu Rosmina, Bu Cia, Pak Revi, dan pak Herman yang selalu memberikan support kepada penulis dan memudahkan segala urusan di kampus.

Akhir kata, penulis berterima kasih kepada diri sendiri yang telah memberikan segenap jiwa dan raganya dalam berikhtiar untuk menyelesaikan kewajibannya sebagai mahasiswa. Terima kasih sudah di titik ini kamu hebat dan kamu kuat, semoga kelak penulis bisa memberikan gebrakan yang lebih dalam segala hal apapun itu. kini, esok, hingga nanti.

Penulis,

Rifki Hendryansah

## ABSTRAK

Rifki Hendryansah. **Partisipasi Publik Dalam Program Pengembangan Kawasan Pedesaan Mandiri (PKPM) Desa Wisata Baruga Collaboration Centre KECAMATAN MALILI, KABUPATEN LUWU TIMUR** (Dibimbing oleh Muh. Tang Abdullah)

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis partisipasi publik dalam pelaksanaan Program Pengembangan Kawasan Pedesaan Mandiri (PKPM) Desa Wisata Baruga Collaboration centre. Program PKPM Merupakan program yang dibuat oleh PT. Vale Indonesia yang dimana target dari program ini merupakan desa desa yang berada pada daerah operasional PT Vale sebagai bentuk tanggungjawab sosial lingkungan. Tujuan dari program ini adalah mengembangkan suatu daerah dengan goal kemandirian terhadap suatu desa, salah satu bentuk nya adalah desa wisata. Tiga dimensi yang digunakan untuk mengukur partisipasi publik dalam program ini, Pemilihan partisipan (*Participant selection*), komunikasi dan pengambilan keputusan, (*communication and decision*), dan otoritas dan kuasa (*authority and power*). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif melalui studi kasus. Penelitian ini berlokasi di desa wisata *Baruga Collaboration centre*, kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur. Adapun informan dalam penelitian ini yaitu perangkat desa baruga sebanyak 2 orang, Pengurus dan pengelola Baruga Collaboration Centre, External Relations PT. Vale Indonesia. Teknik Pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa partisipasi publik dalam program pengembangan kapasitas pedesaan mandiri desa wisata Baruga Collaboration Centre berada pada indikator partisipatif, yang tinggi dibuktikan pada dimensi *Participant Selection* berada pada tren indikator *opened, targeted recruiting* yang berada pada *most inclusive* atau semakin inklusif dalam pemilihan partisipannya, pada dimensi *communication and decision* berada di 2 indikator, yaitu *express preferences* dan *deliberate and negotiate* dalam pengambilan keputusan yang menunjukkan semakin intens dalam forum. Namun, didalamnya terdapat cacat fungsi pelaksanaan, karena pada indikator *authority and power* pihak PT Vale memberikan wewenang secara full dalam pelaksanaannya sehingga dinilai tidak efektif, yang berujung program ini hanya jalan satu tahun kemudian ditinggalkan.

**Kata Kunci: Partisipasi, Pengembangan Kawasan Pedesaan Mandiri, Desa Wisata**

## ABSTRACT

*Rifki Hendryansah. **PUBLIC PARTICIPATION IN THE INDEPENDENT RURAL AREA DEVELOPMENT PROGRAM (PKPM) OF BARUGA VILLAGE TOURISM COLLABORATION CENTER, MALILI SUBDISTRICT, EAST LUWU REGENCY** (Supervised by Muh Tang Abdullah)*

*This research aims to describe and analyze public participation in the implementation of the Independent Rural Development Program (PKPM) at the Baruga Collaboration Centre Tourist Village. The PKPM program is an initiative created by PT Vale Indonesia, targeting villages within its operational areas as part of its corporate social and environmental responsibility. The goal of this program is to develop regions toward achieving self-sufficiency, with one focus being on the creation of tourist villages. Three dimensions are used to measure public participation in this program: Participant Selection, Communication and Decision-making, and Authority and Power. The research method employed in this study is a qualitative descriptive approach through a case study. The research was conducted at the Baruga Collaboration Centre Tourist Village, located in the Malili sub-district, East Luwu Regency. The informants in this study include two village officials from Baruga, the management and administrators of the Baruga Collaboration Centre, and External Relations of PT Vale Indonesia. Data collection techniques used include observation, interviews, and document study. The results of this research show that public participation in the independent rural development program at the Baruga Collaboration Centre Tourist Village is at a high level, as evidenced by the Participant Selection dimension being on the trend of open, targeted recruiting, indicating an increasingly inclusive participant selection process. In the Communication and Decision-making dimension, it is reflected in two indicators: expressing preferences and deliberating and negotiating in decision-making, showing increased intensity in forums. However, there are functional deficiencies in the implementation, as PT Vale granted full authority in its execution, which was deemed ineffective, resulting in the program only running for one year before being abandoned.*

**Kata Kunci: public participation, Independent Rural Development Program, Tourism Village**

## DAFTAR ISI

SKRIPSI .....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI DAN PELIMPAHAN HAK CIPTA .....	v
UCAPAN TERIMA KASIH .....	vi
ABSTRAK .....	vii
ABSTRACT .....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL .....	x
DAFTAR GAMBAR .....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	xi
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Landasan Teori.....	4
1.3 Rumusan Masalah .....	13
1.4 Tujuan Penelitian.....	13
1.5 Manfaat Penelitian .....	13
BAB II METODE PENELITIAN.....	14
2.1 Pendekatan Penelitian .....	14
2.2 Desain Penelitian .....	14
2.3 Prosedur Penelitian .....	14
2.3.1 Informan .....	14
2.3.2 Teknik Pengumpulan Data .....	15
2.3.3 Teknik Analisis Data .....	15
2.4 Validitas dan Realibilitas Data .....	16
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN .....	18
3.1 <i>Participant Selection</i> (Pemilihan Partisipan).....	18
3.2 Komunikasi dan Pengambilan Keputusan ( <i>Communication and Decition</i> ) ...	23
3.3 Otoritas dan Pengaruh ( <i>authority and power</i> ).....	28
BAB IV PENUTUP .....	33
4.1 Kesimpulan.....	33
4.2 Saran.....	34
DAFTAR PUSTAKA.....	35

## DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Pengukuran dimensi Participant selection .....	23
Tabel 3. 2 Pengukuran dimensi communication and decision.....	28
Tabel 3. 3 Pengukuran dimensi authority and power.....	30

**DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1. 1 Design Participatory: Democracy Cube” Fung (2006:, 71).....	6
Gambar 1. 2 Participant Selection, Fung (2006: 69) .....	7
Gambar 1. 3 Communication and decision, Fung (2006: 69).....	9
Gambar 1. 4 authority and power, Fung (2006: 69).....	10
Gambar 1. 5 Kerangka Fikir .....	12

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Pariwisata adalah bagian penting dari perekonomian nasional dan memiliki dampak yang signifikan atau luar biasa dari berbagai aktivitas wisata. Dampak ini terjadi baik secara langsung maupun tidak langsung dengan mendorong pertumbuhan sektor pendukung seperti penginapan, restoran, jasa penukaran uang, dan lainnya (Suprpto, 2005). Industri pariwisata adalah industri yang kompleks karena mencakup berbagai fase perjalanan wisatawan mulai dari tempat asal mereka hingga kembali ke tempat asal mereka. Wisatawan melakukan perjalanan dengan tujuan menggunakan atau mengonsumsi berbagai barang dan jasa di tempat yang mereka kunjungi, yang menyebabkan permintaan pasar untuk barang dan jasa tersebut (Putri & Sari, 2022).

Kemudian, dalam usaha dan pengembangan suatu potensi yang bisa di kembangkan di pedesaan harus dibutuhkan beberapa jaringan kebijakan yang harus bersinergi di dalamnya. Arif yahya dalam *Journal of Public Sector Innovation (2019)*. Stakeholder yang dimaksud agar bersinergi yaitu *Academitian, Business, Community, Government, dan media* atau yang disebut *Pentahelix* .

Untuk membiayai pembangunan daerah, undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah mewajibkan setiap daerah untuk mengeksplorasi potensinya. Desa wSSisata adalah salah satu contohnya. Desa wisata adalah desa, yang mengembangkan seluruh potensi, kebudayaan, alam dan masyarakatnya yang dijadikan objek wisata. Dengan adanya desa wisata ini mampu menunjang kemandirian terhadap desa, baik dari segi pengelolaan dan pendapatan.

Melibatkan dan mendorong partisipasi masyarakat dalam setiap aktivitas penyelenggaraan pemerintahan adalah salah satu cara membangun dan mewujudkan ketatapemeintahan yang baik (*Good governance*). Demokrasi adalah dasar dari ketatapemeintahan yang baik, yang menuntut partisipasi seluruh masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, mulai dari perumusan dan penyusunan kebijakan hingga pelaksanaan dan pengendalian pemerintahan.

Kabupaten Luwu Timur, terletak di Provinsi Sulawesi Selatan, adalah sebuah daerah yang kaya akan keindahan alam dan topografi yang beragam. Potensi wisata alamnya yang meliputi pegunungan, pantai, dan danau, menjadi daya tarik utama bagi para wisatawan. Keindahan alam yang dimiliki Kabupaten Luwu Timur tidak hanya menjadi sumber kebanggaan lokal, tetapi juga menjadi sumber pendapatan yang signifikan melalui sektor pariwisata. Pendapatan dari pariwisata tersebut memberikan kontribusi penting bagi perekonomian kabupaten ini, menciptakan lapangan kerja baru, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.

Dengan memanfaatkan potensi pariwisata secara optimal, Kabupaten Luwu Timur mampu menggerakkan roda perekonomian lokal. Selain memberikan penghasilan langsung bagi industri pariwisata, sektor ini juga mendukung berbagai usaha kecil dan menengah di sekitarnya, termasuk warung makan, penginapan, dan toko souvenir. Dengan demikian, pariwisata tidak hanya menjadi sarana untuk menikmati keindahan alam, tetapi juga sebagai instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan dan pembangunan sosial ekonomi masyarakat Luwu Timur secara keseluruhan.

Kabupaten Luwu Timur periode 2021-2024 ada salah satu program strategis dan merupakan yang dijabarkan dari visi misi kabupaten Luwu Timur “ *Mengembangkan perekonomian daerah yang berdaya saing dan berjangkauan luas*” .Untuk menyukseskan proses ini, maka dibutuhkan pula sinergitas antar stackholder, maka dari itu kabupaten Luwu Timur membuka kesempatan berkolaborasi dalam pengembangan dalam segala hal.

Salah satu dari solusi pengembangan wisata lokal, pemerintah kabupaten luwu timur menggaet PT. Vale Indonesia dengan mempergunakan program CSR sebagai alat untuk memberi dukungan kepada masyarakat. Di samping menjadi keharusan menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas, ISO 26000 diakui sebagai landasan karena di dalamnya ada aturan tentang CSR atau Tanggung jawab sosial lingkungan berdasarkan regulasi dari Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 41 Tahun 2016 tentang Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) dalam Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Program Kawasan Perdesaan Mandiri (PPMPKPM) merupakan salah satu program CSR PT. Vale yang disepakati melalui Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara PT. Vale, pemerintah daerah Luwu Timur, dan masyarakat setempat. PKS ini bertujuan untuk mengatur implementasi program CSR PT. Vale dengan jelas.

Dengan bekerja sama melalui program PKPM. Hal ini yang mendorong PT Vale indonesia dengan program PKPM nya sebagai bentuk Tanggung jawab sosial dan lingkungan/TJSL khususnya Di desa Baruga Untuk membentuk desa wisata. Dengan keindahan alam dan kebudayaan yang berlimpah, desa baruga sangat mempunyai potensi untuk digali. Dengan bermodalkan potensi itu, pemerintah luwu timur kemudian menggaet PT. Vale Indonesia TBK dengan Program TJSL, PKPM nya untuk mengembangkan desa wisata Baruga Baruga *collaboration centre*.

PKPM bertujuan meningkatkan kapasitas produksi, daya saing, nilai tambah, dan kemandirian ekonomi masyarakat di wilayah terdampak operasi pertambangan. PKPM memberikan dana stimulan bagi masyarakat untuk pengembangan kawasan dan produk unggulan desa/produk unggulan kawasan. Transformasi PMDM ke PKPM telah melewati proses konsultasi dan koordinasi dengan pemangku kepentingan terkait: Kementerian ESDM, Pemkab Luwu Timur, dan masyarakat yang tergabung dalam Forum Tiga Pilar. Pelaksanaan PKPM selaras dengan berbagai regulasi, terutama terkait pelaksanaan program pengembangan masyarakat di lingkup perusahaan tambang. PKPM juga mengacu pada Peraturan Menteri Desa

dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Permen Desa) No.5 Tahun 2016 Tentang Pengembangan Kawasan Perdesaan.

Salah satu bagian dari program PKPM ini adalah pembangunan Desa Wisata Baruga *Collaboration Centre*. Diharapkan bahwa pembangunan ini akan menjadi contoh baru untuk pemberdayaan masyarakat dan potensi Desa Baruga. Desa Wisata Baruga *Collaboration Centre* dibangun untuk mendukung berbagai kegiatan pemberdayaan CSR di wilayah Kecamatan Malili, termasuk pembuatan sarana untuk membantu usaha-usaha masyarakat setempat, mulai dari Pusat Jajanan Serba Ada/PUJASERA, hingga wahana hiburan untuk anak di bawah umur.

Namun, untuk menyukseskan dalam semua kegiatan tersebut, diperlukan partisipasi publik. Partisipasi sebagai kesediaan untuk membantu berhasilnya setiap program sesuai kemampuan setiap orang tanpa berarti mengorbankan kepentingan diri sendiri (Mubyarto, 2000). Fokus partisipasi masyarakat adalah untuk menghasilkan ide dan persepsi yang bermanfaat bagi masyarakat yang berkepentingan (*public interest*) untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan (Center dalam Riskayana, 2015)

Salah satu aspek krusial dari administrasi publik yang demokratis adalah keterlibatan publik dalam proses administrasi tersebut. Menurut Nancy Roberts (2002), partisipasi publik adalah pondasi utama dalam administrasi publik yang demokratis, sementara menurut Sherry R. Arnstein (1967), hal itu merupakan kekuatan masyarakat *Citizen Power*. Partisipasi publik diperlukan untuk mempengaruhi berbagai kegiatan administratif yang memengaruhi kehidupan agar sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, untuk mencapai kesuksesan dalam suatu program, partisipasi merupakan hal yang sangat diperlukan. Partisipasi publik sangat penting di negara-negara yang mengembangkan demokrasi. Ketika sistem pemerintahan yang menganut paham demokrasi mengabaikan partisipasi masyarakat, sistem tersebut akan menghadapi tantangan yang signifikan di manapun di dunia ini. Menurut penelitian dalam ilmu politik, partisipasi masyarakat merupakan salah satu elemen penting yang diperlukan untuk berlangsungnya pemerintahan demokratis. Tidak hanya keterlibatan masyarakat dalam pemilihan umum, tetapi juga keterlibatan dalam berbagai aktivitas politik yang bermanfaat bagi masyarakat.

Kemudian yang menjadi problematika di dalam pelaksanaan program PKPM di desa baruga ini adalah dalam pengimplementasiannya banyak permasalahan teknis yang terjadi dan berakar kepada bagaimana partisipasi antar stakeholder yang bersinergi di dalam pelaksanaannya. Mulai dari infrastruktur yang menunjang suatu jalannya kegiatan badan usaha yang tidak terurus, yang berujung kegiatan bisnis tertutup dan tidak jalan operasional dan pelaksanaannya. Sehingga per bulan maret 2024 program ini lumpuh total dan tidak ada kegiatan di daerah desa wisata tersebut.

Berdasarkan problem diatas, maka beberapa penerapan partisipasi publik di dalam kegiatan teknisnya dinilai bisa membantu untuk menyelesaikan dan

memberikan solusi kepada beberapa stackholder yang terlibat di dalamnya. Maka dari itu penulis tertarik mengambil judul penelitian "**PARTISIPASI PUBLIC DALAM PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN PEDESAAN MANDIRI (PKPM) DESA WISATA BARUGA COLLABORATION CENTRE**". Penulis ingin mengetahui mengenai partisipasi publik dalam menyelesaikan masalah operasional PKPM Desa Wisata Baruga *Collaborative Centre*.

## 1.2 Landasan Teori

Dasarnya *Partisipasi* memiliki banyak definisi. Beberapa orang menganggapnya mirip dengan program informasi publik yang menyebarkan berita kepada masyarakat. Ini sering digunakan untuk menggambarkan audiensi publik di mana orang-orang memberikan komentar mereka tentang rencana lembaga. Ini juga telah digunakan untuk menggambarkan kesepakatan yang dibuat dengan publik yang berdampak padanya.

*Partisipasi publik* adalah proses dimana perhatian publik, kebutuhan, dan nilai-nilai dimasukkan ke dalam pengambilan keputusan pemerintah dan perusahaan. Ini adalah komunikasi dan interaksi dua arah, dengan tujuan keseluruhan keputusan yang lebih baik yang didukung oleh publik. (Noer, 2022). Adapun syarat dari partisipasi publik menurut Noer (2022) yaitu:

1. Partisipasi publik berlaku untuk keputusan administratif yaitu, yang biasanya dibuat oleh lembaga (dan kadangkadang oleh organisasi swasta), bukan pejabat atau hakim yang dipilih.
2. Partisipasi masyarakat tidak hanya sekedar memberikan informasi kepada masyarakat. Ada interaksi antara organisasi pembuat keputusan dan orang-orang yang ingin berpartisipasi
3. Ada proses yang terorganisir untuk melibatkan masyarakat. Bukan sesuatu yang terjadi secara kebetulan atau kebetulan.
4. Para peserta memiliki beberapa tingkat dampak atau pengaruh pada keputusan yang dibuat.

Di antara bentuk partisipasi publik yang paling umum dalam pemerintahan demokratis lokal adalah model Variasi Partisipasi yang diusulkan oleh Archon Fung. Model ini mencakup metode seleksi partisipatif, cara komunikasi dan pengambilan keputusan, serta tingkat kekuasaan dan wewenang yang diberikan kepada publik. Model Variasi Partisipasi, yang diusulkan oleh Archon Fung dalam artikelnya yang sangat dihormati dalam Tinjauan Administrasi Publik tahun 2006, "Varietas Partisipasi dalam Tata Kelola yang Kompleks," membahas berbagai jenis partisipasi publik dalam pengambilan keputusan politik dan kebijakan. Meskipun model Fung dapat digunakan di seluruh negeri, fokus analisisnya pada fungsi pemerintah dan lembaga lokal (seperti sekolah atau kota).

*“Jika alasan terbaik bagi partisipasi publik adalah alasan yang diberikan oleh John Dewey bahwa orang yang memakai sepatu, bukan pembuat sepatu, yang paling tahu di mana sepatu itu terjepit maka para partisipan perlu melakukan lebih dari sekadar mengeluh kepada pembuat kebijakan.”*

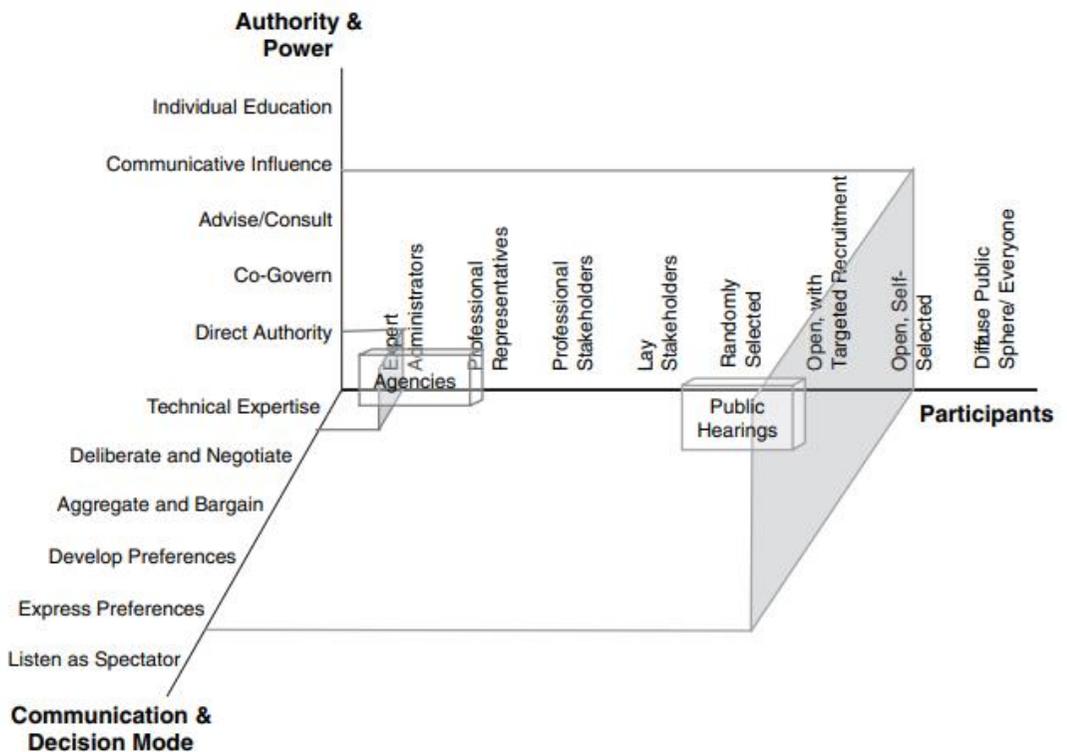
Menurut Fung (2006), keputusan tentang desain institusi umum, seperti dalam proyek pengembangan perkotaan yang kompleks, selalu diadakan partisipasi dari berbagai “arena”, termasuk perencanaan lembaga, negosiasi pemangku kepentingan, ruang lingkup dewan, dan audiensi publik. Interaksi arena termasuk adanya bidang-bidang pejabat publik yang beroperasi secara terpisah dari masyarakat umum. Ini penting untuk dipertimbangkan karena ada lokasi yang beroperasi tanpa partisipasi atau input publik sama sekali. Dalam konteks demokrasi modern, salah satu tugas penting adalah memahami jenis partisipasi yang layak dan bermanfaat, karena tidak ada struktur atau lembaga yang langsung memfasilitasi partisipasi masyarakat. Dalam esainya yang berjudul “A Ladder of 66 Public Administration Review Desember 2006 Special Issue Citizen Participation” (1969), Sherry Arnstein mengembangkan tipologi yang signifikan dalam karya yang mungkin masih paling banyak dikutip dalam literatur tentang demokrasi partisipatif. Ia menyatakan bahwa, karena “redistribusi kekuasaanlah yang memungkinkan warga negara yang tidak punya... untuk dengan sengaja diikutsertakan di masa depan,” partisipasi sangat penting. Dia menawarkan “tangga” pemberdayaan yang terdiri dari delapan anak tangga: terapi, pemberian informasi, manipulasi, konsultasi, penenangan, kolaborasi, delegasi kekuasaan, dan terakhir, kontrol warga.

Dalam Penelitian ini menggunakan teori yang digunakan adalah teori yang dikemukakan oleh (Achon Fung, 2006). Berakar dari desain institusi yang menghendaki *Government Choises* lalu fung mengutarakan tiga pertanyaan penting mengenai partisipasi public.

*“Siapa yang berpartisipasi? Bagaimana mereka berkomunikasi dan membuat keputusan? Apa hubungan antara kesimpulan dan pendapat mereka dengan implementasi atau kebijakan publik yang dihasilkan?”*

Dari pertanyaan diatas maka Fung (2006) Merumuskan model teori “*Design Partisipatory: Democracy Cube*”. Yang dimana teori ini mengukur tentang model desain partisipasi yaitu, *participation selection, communication and decision*, dan *authority and power*

Gambar 1. 1 Design Participatory: Democracy Cube” Fung (2006:, 71)



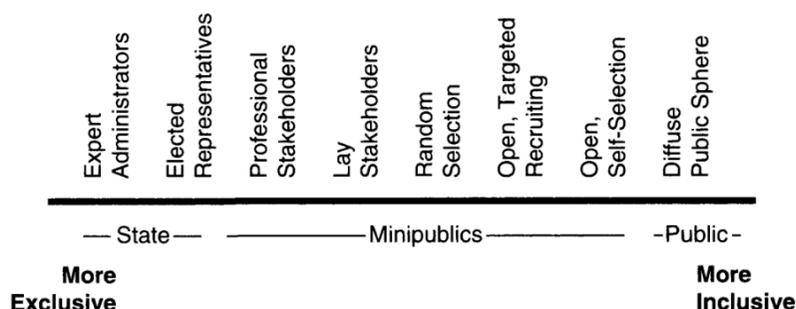
#### a. Participant Selection

Salah satu alasan utama untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam bidang pemerintahan modern adalah bahwa kelompok pengambil keputusan yang berwenang, yang biasanya terdiri dari pejabat administratif atau perwakilan, masih kurang. Mereka mungkin tidak memiliki pengetahuan, keterampilan, tujuan publik, sumber daya, atau rasa hormat yang diperlukan untuk memaksakan kepatuhan dan kerja sama.

Dalam konteks demokrasi modern, sangat penting untuk memahami jenis partisipasi yang layak dan bermanfaat, terutama dalam situasi di mana tidak ada undang-undang atau lembaga langsung yang mendorong partisipasi masyarakat. Sherry Arnstein mengembangkan tipologi yang signifikan dalam esainya "*A Ladder of Citizen Participation*" (1969), yang diterbitkan dalam *Public Administration Review* pada Desember 2006, dalam karyanya yang sering dikutip dalam literatur tentang demokrasi partisipatif. Arnstein berpendapat

bahwa partisipasi penting karena redistribusi kekuasaan memungkinkan warga yang kurang berdaya untuk ikut serta secara signifikan di masa depan. Ia menunjukkan delapan tingkat pemberdayaan, dari manipulasi hingga kontrol warga.

**Gambar 1. 2 Participant Selection, Fung (2006: 69)**



Sebagian besar mekanisme partisipasi masyarakat cenderung terbuka bagi setiap orang yang ingin berpartisipasi, tetapi mereka seringkali hanya mewakili kelompok tertentu dan tidak mencerminkan masyarakat secara keseluruhan. Dua cara alternatif untuk memilih peserta telah diusulkan. Yang pertama adalah dengan memilih peserta dari subkelompok yang jarang terlibat (misalnya, pengorganisir komunitas yang mempublikasikan pertemuan di komunitas berpenghasilan rendah). Metode kedua adalah memilih peserta secara acak dari populasi umum, yang dianggap sebagai jaminan terbaik untuk keterwakilan deskriptif. Selain itu, ada upaya untuk melibatkan pemangku kepentingan umum dalam percakapan dan keputusan publik serta menggabungkan pemangku kepentingan profesional melalui proses tata kelola seperti negosiasi regulasi. Mekanisme partisipasi konvensional yang memilih individu untuk posisi di negara bagian berbeda dengan mekanisme partisipasi ini, yang disebut sebagai "mini-publik". Mini publik adalah kelompok pertengahan yang sengaja mengumpulkan anggota dalam badan-badan terpisah untuk berbicara atau memutuskan masalah yang menjadi perhatian publik. Lima Model mekanisme termasuk dalam kategori ini (Fung, 2006):

- 1) Model terbuka dan dipilih sendiri (*open, self selected*) memungkinkan individu untuk secara bebas memilih untuk berpartisipasi, sering kali menarik orang-orang yang memiliki pendidikan atau minat khusus terhadap isu terkait;
- 2) Model terbuka dengan perekrutan yang ditargetkan (*open, targeted recruiting*) melibatkan perekrutan kelompok-kelompok tertentu, terutama mereka yang jarang terlibat, untuk ikut serta dalam partisipasi;
- 3) Model pemilihan acak (*random selection*) melibatkan pemilihan peserta secara acak dari populasi umum untuk membahas isu-isu publik;

- 4) Model pemangku kepentingan awam (*lay stakeholders*) mencakup warga yang memiliki minat dalam isu publik tertentu, tidak mendapatkan bayaran untuk partisipasi mereka, tetapi rela meluangkan waktu dan energi untuk mewakili mereka yang memiliki minat serupa namun tidak aktif berpartisipasi;
- 5) Model pemangku kepentingan profesional (*professional stakeholders*) mencakup peserta yang biasanya merupakan perwakilan yang dibayar untuk kepentingan khusus yang terorganisir.

Negara (State) merupakan kategori partisipasi yang paling terbatas atau eksklusif, di mana pemilihan partisipan hanya mencakup individu-individu yang memiliki posisi dalam struktur negara. Kategori ini melibatkan dua mekanisme utama, yaitu:

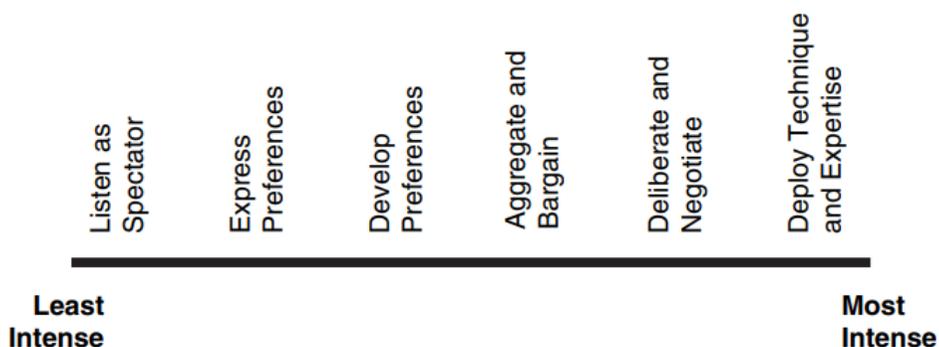
- 1) Pemilihan kompetitif yang memilih perwakilan dari kalangan politisi profesional (*elected representatives*) untuk menyuarakan kepentingan publik; dan
- 2) Staf ahli administrasi (*expert administrators*) yang mengisi posisi di dalam birokrasi publik.

Di sisi lain, Publik merupakan kategori yang paling inklusif atau tidak terbatas dengan mekanisme partisipasi yang sepenuhnya melibatkan masyarakat umum (*diffuse public sphere*), seperti melalui media massa, organisasi masyarakat, dan ruang diskusi informal lainnya.

#### *b. Communication and decision*

Penentuan cara orang yang terlibat dalam komunikasi dan pengambilan keputusan publik (*Communication and decision*) adalah dimensi penting kedua dari desain institusional. Fung (2006) menggambarkan dimensi ini, berdasarkan skala insensitas, dari yang intens hingga menjadi sangat intens, disini intensitas menggambarkan tingkat kontribusi, pengetahuan, dan komitmen dalam partisipasi.

**Gambar 1. 3 Communication and decision, Fung (2006: 69)**



Fung (2006) mengidentifikasi enam model komunikasi dan pengambilan keputusan, yaitu:

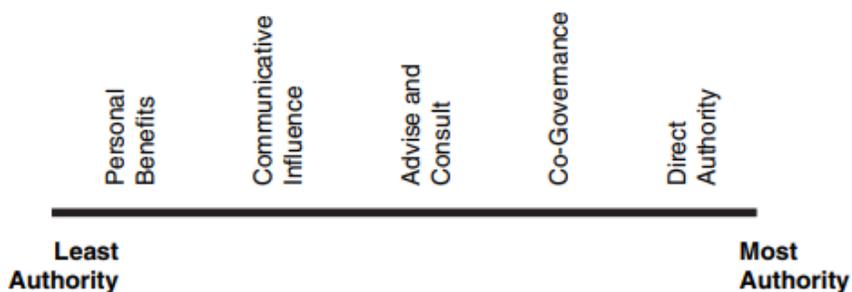
- 1) Mendengarkan sebagai penonton (listen as a spectator), di mana mayoritas warga tidak menyuarakan pendapat mereka sendiri; sebaliknya, mereka berpartisipasi sebagai penonton yang menerima informasi tentang berbagai kebijakan atau proyek dan menyaksikan perselisihan antara politisi, aktivis, dan kelompok kepentingan;
- 2) Mengungkapkan preferensi (express preferences), di mana diskusi publik memberikan kesempatan bagi beberapa orang untuk menyuarakan pendapat mereka;
- 3) Mengembangkan Preferensi (Develop Preferences) berarti mekanisme partisipasi di mana peserta tidak hanya menyampaikan preferensi yang sudah ada, tetapi juga mengeksplorasi, mengembangkan, dan mungkin mengubah preferensi mereka melalui interaksi dan pertukaran informasi. Proses ini melibatkan diskusi yang mendalam, sering kali dengan bantuan materi edukatif, untuk membantu peserta memahami berbagai alternatif dan mencapai pandangan yang lebih terinformasi dan matang.
- 4) Agregasi dan tawar-menawar (aggregate and bargain), di mana peserta sudah mengetahui apa yang mereka inginkan sejak awal. Pengaruh dan kekuatan yang mereka bawa untuk mengomunikasikan preferensi mereka ke dalam pilihan sosial dan mendukung preferensi bersama sering menentukan cara pengambilan keputusan ini;
- 5) Musyawarah dan negosiasi (deliberate and negotiate), di mana peserta secara sengaja menentukan keinginan mereka baik secara individu maupun dalam kelompok. Ini biasanya mencakup materi pendidikan, dan mereka berbagi pandangan, pengalaman, dan alasan satu sama lain untuk mengembangkan pandangan dan menemukan minat mereka;
- 6) Memanfaatkan teknik dan keahlian (deploy technique and expertise), yaitu memanfaatkan keahlian teknis para pejabat yang memiliki pelatihan dan spesialisasi profesional yang sesuai untuk memecahkan masalah tertentu. Orang-orang biasanya tidak terlibat dalam model mekanisme ini. Perencana,

regulator, pekerja sosial, guru, kepala sekolah, polisi, dan lainnya terlibat dalam hal ini.

*c. Authority and Power*

Dimensi ini berfungsi untuk mengukur seberapa besar pengaruh yang dihasilkan dari partisipasi masyarakat terhadap proses pengambilan kebijakan dan implementasi tindakan publik. Hal ini penting karena tingkat pengaruh inilah yang menentukan sejauh mana partisipasi masyarakat dapat berkontribusi dalam menyelesaikan masalah-masalah demokrasi seperti legitimasi, keadilan, dan efektivitas. Fung (2006) Menggambarrkan dimensi ini skala otoritasnya dimana ruang partisipasi mulai dari otoritas terkuat hingga otoritas terlemah.

**Gambar 1. 4 authority and power, Fung (2006: 69)**

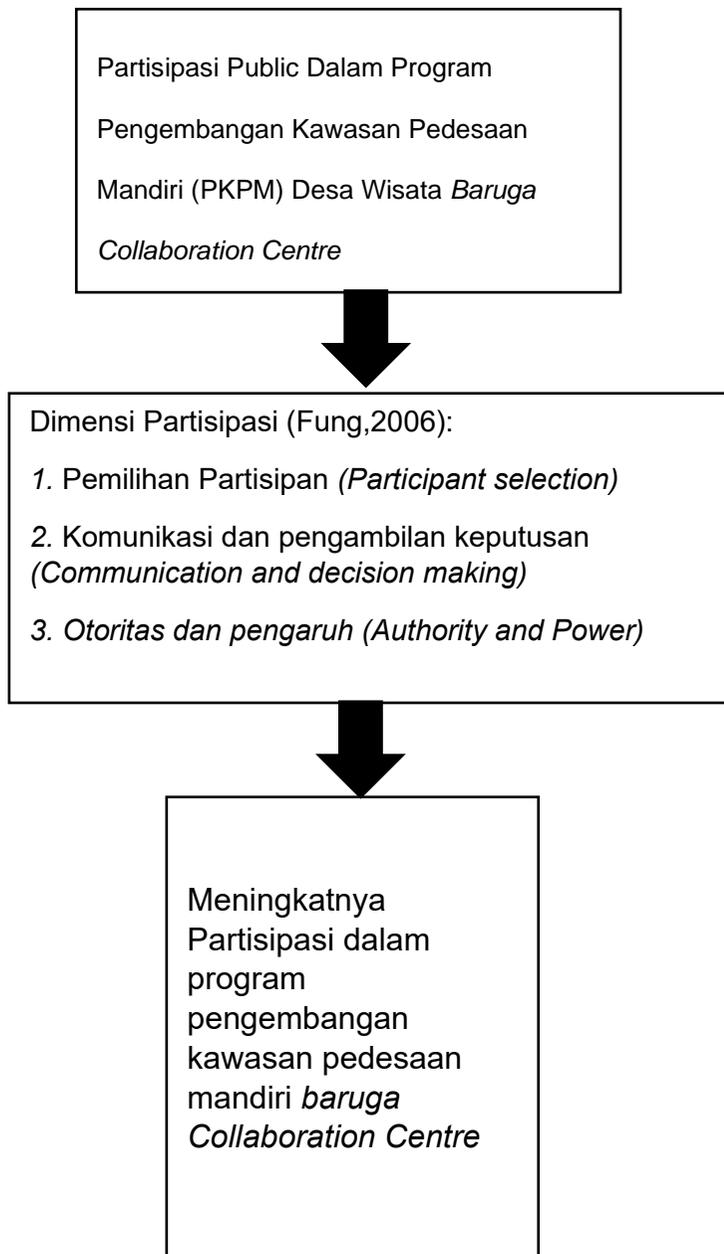


Fung (2006) mengidentifikasi lima kategori tingkat pengaruh dan kewenangan yang dapat dimiliki oleh berbagai mekanisme partisipasi, yaitu:

- 1) Keuntungan pribadi (Personal Benefit), di mana pengaruh paling kecil terjadi ketika partisipan hanya berpartisipasi untuk mendapatkan manfaat pribadi tanpa harapan memengaruhi kebijakan atau tindakan. Mereka hanya mendengarkan informasi yang disampaikan.
- 2) Pengaruh komunikatif (Communicative Influence), di mana tingkat pengaruh sedang terjadi ketika hasil diskusi partisipasi masyarakat dapat memengaruhi opini publik atau pejabat melalui komunikasi, seperti mempengaruhi dukungan masyarakat terhadap suatu laporan.
- 3) Nasihat dan konsultasi (Advise and Consult), di mana tingkat pengaruh sedang-tinggi terjadi ketika partisipasi masyarakat dapat memberikan saran dan konsultasi kepada pejabat, meskipun pejabat tetap mempertahankan kewenangannya.

- 4) Pemerintahan bersama (Co-Governance), di mana tingkat pengaruh tinggi terjadi ketika partisipan diberikan kewenangan untuk bekerja sama membuat rencana dan kebijakan bersama pejabat.
- 5) Otoritas langsung (Direct Authority), di mana tingkat pengaruh paling tinggi terjadi ketika partisipasi masyarakat diberikan kewenangan langsung atas pengambilan keputusan publik atau sumber daya. Contoh mekanisme dengan kewenangan langsung adalah rapat desa di New England. Sementara sebagian besar partisipasi hanya sebatas memberi saran, untuk meningkatkan keadilan diperlukan kewenangan lebih besar karena saran biasanya tidak diindahkan.

Oleh karena itu, dimensi ini sangat penting untuk mengukur sejauh mana hasil diskusi partisipasi masyarakat dituangkan ke dalam tindakan publik nyata, mulai dari hanya untuk pendidikan hingga kewenangan penuh atas pengambilan keputusan. Inilah yang paling berpotensi untuk menyelesaikan masalah keadilan.

**Gambar 1. 5 Kerangka Fikir**

### 1.3 Rumusan Masalah

Dengan mempertimbangkan latar belakang masalah yang telah disebutkan, penulis bermaksud untuk melakukan penelitian dengan rumusan masalah yaitu “Bagaimana Partisipasi Publik Dalam program pengembangan kawasan pedesaan mandiri (PKPM) desa wisata baruga *collaboration centre*?”

### 1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan, tujuan penelitian ini adalah untuk memahami Partisipasi *Publik* dalam program pengembangan kawasan pedesaan mandiri (PKPM) desa wisata *Baruga collaboration centre*.

### 1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi salah satu referensi yang berguna untuk digunakan sebagai berikut :

#### 1. Manfaat Teoritis (Akademis)

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada individu atau organisasi yang memerlukan pemahaman atau informasi mengenai partisipasi publik dalam pengembangan kawasan pedesaan mandiri dan desa wisata, serta menjadi sumber referensi untuk mahasiswa program studi ilmu administrasi publik dalam penelitian mendatang.

#### 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan akan memberikan keuntungan untuk seluruh individu yang tertarik dalam mendapatkan informasi mengenai objek wisata dan *cooperate social responsibility* (CSR), serta menjadi sumber masukan penting untuk Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Luwu Timur, Pemerintah desa Baruga dan PT. Vale Indonesia dalam berkolaborasi dan merancang pengembangan lebih lanjut untuk Program pengembangan kawasan pedesaan mandiri khususnya di sektor pariwisata.

## **BAB II METODE PENELITIAN**

### **2.1 Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan Metode penelitian kualitatif, yang dimana digunakan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang berbagai data yang dikumpulkan dari objek penelitian, yaitu Desa Wisata Baruga, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur. Creswell (2018) menyatakan bahwa pendekatan kualitatif digunakan untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang dianggap muncul dari suatu masalah sosial atau kemanusiaan oleh individu atau kelompok.

### **2.2 Desain Penelitian**

Adapun desain penelitian yang digunakan oleh penulis adalah *study case*, yang dimana strategi penelitian ini penekanannya adalah penyidikan dari rentetan rentetan permasalahan dari latar belakang. Kemudian peneliti melakukan analisis mendalam mengenai kasus yang terjadi mulai dari berbagai perspektif stackholder yang berpartisipasi di dalam program pengembangan kapasitas kawasan pedesaan mandiri (PKPM) di desa wisata *baruga collaboration centre*. Di dalam penelitian ini melihat secara keseluruhan bagaimana partisipasi publik itu berjalan di PKPM desa wisata baruga collaboration centre, mulai dari tahap perencanaan, *budgeting* penandatanganan *memorandum of understanding* MoU, pelaksanaan, sampai ke evaluasi dalam program ini. Selain itu, penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analisis. Artinya melaporkan data yang diperoleh dalam bentuk teks (narasi) dan gambar, bukan angka. Oleh karena itu, peneliti menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan menggunakan strategi penelitian studi kasus. Hal ini dikarenakan studi kasus memungkinkan peneliti memperoleh informasi yang lebih detail.

### **2.3 Prosedur Penelitian**

Langkah-langkah dalam penelitian ini terdiri dari beberapa tahapan. Tahap pertama adalah pembuatan instrumen penelitian, yakni pedoman wawancara, oleh peneliti. Setelah itu, pedoman wawancara yang telah disusun didiskusikan dengan Dosen Pembimbing untuk mendapatkan masukan dan persetujuan. Setelah memperoleh persetujuan, peneliti melanjutkan ke tahap berikutnya dengan melakukan penelitian lapangan guna mengumpulkan data. Informan yang terlibat dalam penelitian ini dapat dijelaskan berikut:

#### **2.3.1 Informan**

Penelitian ini melibatkan partisipan yang memiliki pengetahuan yang relevan dan dapat memberikan gambaran dan wawasan yang mendalam tentang objek penelitian. Kemudian penelitian ini mewawancarai sebanyak 7 orang informan yang berperan and ambil andil di dalam pelaksanaan Program pengembangan kapasitas pedesaan mandiri *baruga collaboration centre*. Adapun informan yang dimaksud, yaitu:

1. Corporate Relations PT. Vale Indonesia
2. Sekretaris Desa Baruga
3. Kepala Dusun Baruga
4. Pengelola dan pengurus (2 orang)

### 2.3.2 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah serangkaian metode yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan informasi atau data yang diperlukan. Creswell (2018) menjelaskan tiga teknik dalam pengumpulan data, yaitu sebagai berikut:

#### a) Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data penelitian yang melibatkan komunikasi langsung antara peneliti dan narasumber, dengan mengajukan pertanyaan secara langsung. Tujuan utama dari wawancara adalah memperoleh informasi yang relevan dan mendalam serta pengalaman dari narasumber terkait objek penelitian atau masalah penelitian yang sedang diteliti. Dengan demikian, wawancara diharapkan dapat menjadi sumber informasi penelitian mengenai memahami Partisipasi *Public* dalam program pengembangan kawasan pedesaan mandiri (PKPM) desa wisata *Baruga collaboration centre*.

#### b) Observasi

Observasi dilakukan dengan mengamati dan mencatat objek fokus secara langsung. Objektif tersebut digunakan untuk mengumpulkan data dan memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang masalah yang diselidiki dalam setiap aktivitas yang terjadi. Teknik pengumpulan data melalui wawancara melibatkan peneliti yang mengajukan sejumlah pertanyaan kepada informan. Tujuannya adalah untuk mendapatkan data yang bersifat deskriptif, serta menggali persepsi, pendapat, perasaan, keyakinan, dan pengalaman dari para informan.

#### c) Dokumentasi

Dokumentasi sebagai proses pembuktian yang melibatkan berbagai jenis sumber, seperti tulisan, lisan, gambaran, atau hasil penelitian. Untuk mengeksplorasi potensi program pengembangan kawasan pedesaan mandiri (PKPM) desa wisata *Baruga collaboration centre*. Dokumentasi digunakan untuk memvisualisasikan lokasi setiap saat dan gambaran. Untuk menyimpan catatan tentang penelitian ini, foto dan video serta rekaman suara informan digunakan.

### 2.3.3 Teknik Analisis Data

Creswell (2018) menjelaskan bahwa tujuan dari analisis data adalah untuk memahami data yang berbentuk teks dan gambar. Proses ini melibatkan segmentasi dan pemisahan data, yang kemudian digabungkan kembali. Creswell (2018) juga merinci beberapa tahapan dalam analisis data sebagai berikut:

#### 1) Mengatur dan Mempersiapkan Data (*Organizing and Preparing Data*)

Tahap awal analisis data melibatkan pengaturan dan persiapan data untuk dianalisis. Ini termasuk mentranskripsi wawancara, memindai bahan, mengetik catatan lapangan, dan mengkatalogkan semua bahan visual. Setelah itu, data diurutkan dan diorganisasikan ke dalam kategori yang berbeda sesuai dengan sumber informasi.

## 2) Membaca dan Memahami Data (*Reading Through All Data*)

Pada langkah ini, peneliti memperoleh gambaran umum tentang informasi yang ada dan merefleksikan makna keseluruhan. Ini melibatkan pemahaman mengenai gagasan umum yang disampaikan oleh informan, ide-ide yang diungkapkan, serta kesan keseluruhan terkait kedalaman, kredibilitas, dan penggunaan informasi.

## 3) Mengkodekan Data (*Coding the Data*)

Pada tahap ini, data diorganisasikan dengan memberikan tanda atau kode tertentu. Peneliti kemudian membuat catatan khusus mengenai data yang diperoleh. Semua data (baik dalam bentuk kalimat maupun gambar) dikelompokkan ke dalam kategori tertentu dan diberi nama atau label. Pemberian nama atau label ini sering kali didasarkan pada bahasa asli atau ungkapan langsung dari informan.

## 4) Menghasilkan Tema/Deskripsi (*Interrelating Themes/Description*)

Tahap ini menggunakan proses pengkodean untuk menghasilkan deskripsi latar atau subjek, serta kategori atau tema untuk dianalisis. Deskripsi melibatkan penyampaian informasi secara rinci tentang individu, tempat, atau peristiwa dalam suatu konteks. Kode-kode yang digunakan juga menghasilkan sejumlah kecil tema atau kategori yang muncul sebagai temuan utama dalam penelitian kualitatif.

## 5) Menginterpretasi Makna Tema/Deskripsi (*Interpreting the Meaning of Themes/Descriptions*)

Ini adalah tahap terakhir dalam analisis data, di mana deskripsi dan tema yang dihasilkan direpresentasikan dalam bentuk narasi kualitatif. Pendekatan yang paling umum digunakan adalah dengan menyajikan temuan analisis dalam bagian naratif.

### 2.4 Validitas dan Realibilitas Data

Gibbs dalam Creswell (2018) berpendapat bahwa validitas kualitatif berarti peneliti memeriksa keakuratan temuan melalui prosedur tertentu, sementara reliabilitas kualitatif menunjukkan konsistensi pendekatan peneliti di berbagai penelitian dan proyek yang berbeda.

#### a) Mendefinisikan Validitas Kualitatif

Creswell & Miller dalam Creswell (2018) berargumen bahwa validitas adalah salah satu kekuatan utama dalam penelitian kualitatif dan didasarkan pada penilaian apakah temuan tersebut akurat dari sudut pandang peneliti, partisipan, atau pembaca laporan. Dalam literatur kualitatif, terdapat berbagai istilah yang terkait dengan validitas, seperti kepercayaan, keaslian, dan kredibilitas.

#### b) Menggunakan Beberapa Prosedur Validitas

Perspektif prosedural yang disarankan untuk proposal penelitian adalah mengidentifikasi dan mendiskusikan satu atau lebih strategi yang tersedia untuk memeriksa keakuratan temuan. Peneliti perlu secara aktif memasukkan strategi validitas ke dalam proposal mereka.

c) Menggunakan Keandalan Kualitatif

Yin dalam Creswell (2018) menyarankan agar peneliti kualitatif mendokumentasikan prosedur studi kasus mereka dengan baik dan mencatat sebanyak mungkin langkah dalam prosedur tersebut. Ia juga merekomendasikan penyiapan protokol dan basis data studi kasus yang terperinci agar orang lain dapat mengikuti prosedur tersebut.

d) Generalisasi Kualitatif

Menurut Gibbs dalam Creswell (2018), generalisasi kualitatif adalah istilah yang digunakan secara terbatas dalam penelitian kualitatif, karena tujuan dari bentuk penelitian ini bukan untuk menggeneralisasi temuan kepada individu, lokasi, atau tempat lain di luar yang diteliti.